



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN NASIONAL PENCARIAN
DAN PERTOLONGAN/BASARNAS**

Tahun Sidang	: 2024 – 2025
Masa Sidang	: I
Rapat	: Ke – 2
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Hari/Tanggal	: Rabu, 21 Agustus 2024
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 11.40 WIB s.d 13.15 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V), Gedung Nusantara DPR RI
Acara	: 1. Membahas Evaluasi APBN TA 2024 sampai dengan Bulan Agustus 2024; 2. Membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN TA 2023; 3. Lain-lain.
Ketua Rapat	: Lasarus, S.Sos.,M.Si
Sekretaris	: Nunik Prihatin Budiastuti, SH
Hadir Anggota	: dari 55 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra	: Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, beserta jajaran.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 11.40 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi hari ini adalah Membahas Evaluasi APBN TA 2024 sampai dengan Bulan Agustus 2024, Membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN TA 2023 dan Lain-lain.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Menteri Desa PDT dan Transmigrasi untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk meningkatkan capaian serapan APBN TA 2024 sesuai saran dan masukan Komisi V DPR RI, dimana capaian per 19 Agustus 2024 sebagai berikut:

KEMENTERIAN	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	52,05%	53,58%

2. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terhadap hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Selanjutnya, Komisi V DPR RI meminta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk meningkatkan kinerja dan mempertahankan capaian opini tersebut di tahun mendatang.
3. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk:
 - a. Meningkatkan pengawasan dan evaluasi rutin untuk memastikan bahwa program-program pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berjalan sesuai rencana dan target yang ditetapkan;
 - b. Berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga lainnya terkait pemberian hak atas dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi untuk desa yang berada di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi sesuai amanat Pasal 5A Ayat (1) UU No 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 - c. Melakukan penyusunan indikator kinerja dalam rangka pengawasan pemanfaatan dana desa;
 - d. Menetapkan target yang lebih terukur dalam proses pembangunan desa dari desa tertinggal menjadi desa mandiri;
 - e. Mengoptimalkan pemanfaatan BUMDesa untuk ketahanan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.15 WIB.

Jakarta, 21 Agustus 2024

**MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI,**

ttd

ABDUL HALIM ISKANDAR

KETUA RAPAT,

ttd

L A S A R U S